

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA				
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA	-	-	-	-
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah				
	JUMLAH PAD	-	-	-	-
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.01	Belanja Pegawai	1,510,337,409.00	1,472,035,253.00	97.46	1,332,619,081.00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403,955,840.00	394,068,173.00	97.55	302,460,285.00
2.1.05	Belanja Hibah			-	
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	1,914,293,249.00	1,866,103,426.00	97.48	1,635,079,366.00
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.01	Belanja Modal Tanah			-	
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17,500,000.00	14,030,100.00	80.17	99,299,500.00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-	
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			-	
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			-	
	Jumlah Belanja Modal	17,500,000.00	14,030,100.00	80.17	99,299,500.00
	JUMLAH BELANJA	1,931,793,249.00	1,880,133,526.00	97.33	1,734,378,866.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(1,931,793,249.00)	(1,880,133,526.00)	97.33	(1,734,378,866.00)

Koto Baru Smlg, Januari 2022
CAMAT PAYAKUMBUH

JONIANTO,S.STP
NIP: 19810531 200012 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No. Akun	Uraian	2021	2020
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.01	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
1.1.01.04.	Kas di BLUD		
1.1.01.05.	Kas Dana BOS		
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07.	Kas Lainnya		
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi		
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.05.03.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.06.06.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.06.07.	Piutang Pendapatan Bunga		
1.1.06.16.	Piutang Pendapatan BLUD		
1.1.06.18.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
1.1.06.19.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
1.1.07.01.	Piutang Dana Perimbangan		
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah		
1.1.08.01.	Piutang Bagi Hasil		
1.1.09.	Piutang Lainnya		
1.1.10.	Penyisihan Piutang		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.10.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.10.01.03.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.10.01.04.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.12.	Persediaan	131,400.00	200,000.00
	Jumlah Aset Lancar	131,400.00	200,000.00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05	Dana Bergulir		
1.2.01.05.01.	Dana Bergulir Kepada Koperasi		
1.2.01.05.02.	Dana Bergulir Kepada Masyarakat		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal		
	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	145,320,000.00	145,320,000.00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	580,080,315.00	568,550,215.00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	866,494,800.00	866,494,800.00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,490,000.00	6,490,000.00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	-	-
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	811,479,083.07	821,754,260.04
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	507,349,267.00	528,751,215.00
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	302,507,316.07	291,542,795.04
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,622,500.00	1,460,250.00
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Aset Tetap	786,906,031.93	765,100,754.96
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.03	Aset Tidak Berwujud		
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.03.01.0005.	Software	-	-
1.5.04	Aset lain-lain		
1.5.04.01.	Aset lain-lain	-	-
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	-	-
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	787,037,431.93	765,300,754.96

2.	KEWAJIBAN	-	-
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
2.1.01.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	-	-
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	-	-
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	-	-
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	-	-
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan		
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	787,037,431.93	765,300,754.96
	JUMLAH EKUITAS	787,037,431.93	765,300,754.96
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	787,037,431.93	765,300,754.96

Koto Baru Smlg, Januari 2022
CAMAT PAYAKUMBUH

JONIAN TO, S. STP
NIP: 19810531 200012 1 001

- 614,334,989.00

|

582,580,315.00

635,514,103.57

(21,401,948.00)

10,964,521.03

162,250.00

10,275,176.97

Mutasi Tambah AT (Diluar BM 2020)

	2020	Tambah	Kurang	2021
1 TANAH	145,320,000			145,320,000
	BM 2021			145,320,000
2 PM	568,550,215			582,580,315
	BM 2021	14,030,100.00		580,080,315
	Mutasi tambah dari BTT			Wastafel
	Mutasi tambah dari BTT			Pengeras suara
	Mutasi Tambag (hibah dari BPBD)			Alat semprot
	Mutasi Keluar			
	Aset ekstrakom			
3 G & B	866,494,800.00			866,494,800
	BM 2021			866,494,800
4 JIJ	6,490,000			6,490,000
	BM 2021			6,490,000
5 ATlainnya	-			-
	BM 2021			-
		14,030,100	-	
		B. Modal 2021	14,030,100	
	PEND. DARI PENDAPATAN HIBAH PUSAT			
		Rekap +/-Aset	-	
Mutasi tambah aset tetap		-		
Mutasi kurang aset tetap		-		
Kapitalisasi barang jasa		-		
BM tidak dikapitalisir		-		
Aset ekstrakom		-		
				Mengurangi beban
				dicatat sebagai beban lain-lain
				dicatat sebagai beban lain-lain

-

580080315

582,580,215

2,500,000

-

-

-

INFO AKRUAL :

1 PENDAPATAN :

Retri-LRA 21	-	
Piut-20 Tertagih 21	-	
Ret-LO	-	
Piut- 21	-	
Ret-LO-21 Final	-	

2 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

· 2019	-	50 % x Rp. 1.800.000,00	-
· 2020	-	10 % x Rp. 4.200.000,00	-
· 2021	-	0,5 % x Rp. 236.514.000,00	-
· 2021 /Karcis	-		-
	-		-

- Belum di verifikasi

4 PERASEDIAAN :

MISAL :1

	2021	2020	
SISA DI NERACA AWAL	200,000.00	-	
BEBAN PERSEDIAAN	49,856,500.00	13,228,950.00	
Persediaan dr Cetak.	-	-	
SISA DI NERACA AKHIR	131,400.00	200,000.00	-
BEBAN PERSEDIAAN	49,925,100.00	13,028,950.00	

PERASEDIAAN :	2021	2020	Belanja LRA	Beban LO
ATK	-	-	-	-
Alat Listrik	-	-		
Alat Kebersihan	-	-		
Obat-obatan	-	-		

5 BEBAN PENYUSUTAN

A. PERALATAN DAN MESIN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020	(528,751,215.00)	12/31/2020	
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(507,349,267.00)	12/31/2021	
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	21,401,948.00		21,401,948.00

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020	(291,542,795.04)	12/31/2020	
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(302,507,316.07)	12/31/2021	
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	(10,964,521.03)		

C. JIJ

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020	(1,460,250.00)	12/31/2020	
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(1,622,500.00)	12/31/2021	
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	(162,250.00)		

D. ASET TETAP LAINNYA

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020	0	12/31/2020	
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	0	12/31/2021	
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	0		

E. ASET LAIN-LAIN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020	0	12/31/2020	
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	0	12/31/2021	
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	0		

TOTAL BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP **10,275,176.97** **2021**

Beban Penyusutan Tahun Sebelumnya **-** **2020**

6 Beban Utang Jk Pendek : UJP 2021		2020	2021	Belanja LRA	Beban LO
Air	-		0	-	-
Listrik			0		
Telpon	-		-	5,350,358.00	5,350,358.00
Speedy			-		
TV Kabel			-		
Utang Jasa Layanan			-		

68,600.00

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Kode Akun	Uraian	2021	2020	Bertambah/ Berkurang	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7.	PENDAPATAN				
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
7.1.01.	Pajak Daerah-LO	-	-		
7.1.02.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	-	-		
7.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-		
	JUMLAH PAD	-	-		
7.2.	PENDAPATAN TRANSFER				
7.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO				
7.2.01.01.	Dana Perimbangan-LO	-	-		
7.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	-		
7.2.01.05.	Dana Desa-LO	-	-		
7.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0	0		
7.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0	0		
7.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	-	0		
7.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	-	-		
	JUMLAH TRANSFER	0.00	0		
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0	0		
7.3.01.	Pendapatan Hibah-LO	-	-		
7.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	0.00		
8.	BEBAN	1,855,896,849.03	1,776,136,488.43		
8.1.	BEBAN OPERASI	1,866,172,026.00	1,634,879,366.00		
8.1.01.	Beban Pegawai	1,472,035,253.00	1,332,619,081.00		
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	394,136,773.00	302,260,285.00		
	Beban Persediaan	49,925,100.00	13,028,990.00		
	Beban Jasa	125,586,673.00	205,151,335.00		
	Beban Pemeliharaan	107,790,000.00	1,500,000.00		
	Beban Perjalanan Dinas	110,835,000.00	82,580,000.00		
8.1.05.	Beban Hibah	-	-		
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial	-	-		
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	-	-		
8.2.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	(10,275,176.97)	104,603,122.43		
8.3.	BEBAN TRANSFER	-	-		
8.4.	BEBAN TAK TERDUGA	-	-		
	Beban Lain-Lain	0	36,654,000		
	JUMLAH BEBAN	1,855,896,849.03	1,776,136,488.43		
	SURPLUS/ (DEFISIT)-LO	-1,855,896,849.03	-1,776,136,488.43		

Koto Baru Smlg. Januari 2022
CAMAT PAYAKUMBUH

JONIANTO,S.STP
NIP: 19810531 200012 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

kode Rekening	Uraian	LRA=LO TAHUN 2021	MUTASI TAMBAH							TOTAL MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG					TOTAL MUTASI KURANG	LO JADI 2021
			Piutang Tahun ini	Hibah dari pihak Luar	Persediaan awal/persediaan dineraca tahun lalu	Utang tahun lalu	Belanja modal tidak dikapital	Aset Ekstrakom	Reklass masuk /pindah rekening		Piutang tahun ini	Persediaan akhir/persediaan dineraca tahun ini	Utang tahun ini	Kapitalisasi barang jasa	Reklass keluar/pindah rekening		
8.1.	BEBAN OPERASIONAL	1,866,103,426.00	-	-	200,000.00	-	#VALUE!	-	-	200,000.00	-	131,400.00	-	-	-	131,400.00	1,866,172,026.00
8.1.01.	Beban Pegawai	1,472,035,253.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,472,035,253.00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1,077,224,753.00								0						0	1,077,224,753
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	851,576,320.00								0						0	851,576,320
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	83,846,140.00								0						0	83,846,140
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	64,880,000.00								0						0	64,880,000
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	-								0						0	-
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	22,625,000.00								0						0	22,625,000
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	46,566,060.00								0						0	46,566,060
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	666,436.00								0						0	666,436
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	12,014.00								0						0	12,014
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	-								0						0	-
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian ASN	7,052,783.00								0						0	7,052,783
8.1.01.01.14.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	314,630,500.00								0						0	314,630,500
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	314,630,500.00								0						0	314,630,500
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80,180,000.00								0						0	80,180,000
8.1.01.03.06.	Beban Honorarium	80,180,000.00								0						0	80,180,000
8.1.01.99.99.	Beban Persediaan	49,856,500.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	131,400.00	-	-	-	131,400.00	49,925,100.00
8.1.02.01.	Beban Barang Pakai Habis	49,856,500.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	131,400.00	-	-	-	131,400.00	49,925,100.00
8.1.02.01.01.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.02.01.01.0023.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17,320,900.00															
8.1.02.01.01.0025.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,605,100.00			200000					200000		131400				131400	17,389,500
8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	280,000.00								0						0	7,605,100
8.1.02.01.01.0030.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	534,000.00								0						0	280,000
8.1.02.01.01.0034.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	3,321,000.00								0						0	534,000
8.1.02.01.01.0049.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	16,670,500.00								0						0	3,321,000
8.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4,125,000.00								0						0	16,670,500
8.1.02.01.02.0004.	Beban Jasa	125,586,673.00								0						0	4,125,000
8.1.02.02.	Beban Jasa Kantor	118,707,554.00								0						0	125,586,673
8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	18,000,000.00								0						0	118,707,554
8.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54,000,000.00								0						0	18,000,000
8.1.02.02.01.0028.	Beban Jasa Tenaga Ahli / Tim Pelaksana Kegiatan	5,040,000.00								0						0	54,000,000
8.1.02.02.01.0029.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	18,000,000.00								0						0	5,040,000
8.1.02.02.01.0055.	Beban Tagihan Telepon	5,350,358.00								0						0	18,000,000
8.1.02.02.01.0060.	Beban Tagihan Listrik	3,305,196.00								0						0	5,350,358
8.1.02.02.01.0061.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1,260,000.00								0						0	3,305,196
8.1.02.02.01.0069.	Beban Lembur	13,752,000.00								0						0	1,260,000
										0						0	13,752,000

kode Rekening	Uraian	LRA=LO TAHUN 2021	MUTASI TAMBAH							TOTAL MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG					TOTAL MUTASI KURANG	LO JADI 2021
			Piutang Tahun ini	Hibah dari pihak Luar	Persediaan awal/persediaan dineraca tahun lalu	Utang tahun lalu	Belanja modal tidak dikapital	Aset Ekstrakom	Reklass masuk /pindah rekening		Piutang tahun ini	Persediaan akhir/persediaan dineraca tahun ini	Utang tahun ini	Kapitalisasi barang jasa	Reklass keluar/pindah rekening		
8.1.02.02.01.0074	Beban luran Jaminan/Asuransi	824,119.00							0						0	824,119	
8.1.02.02.02.0005	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	206,030.00							0						0	206,030	
8.1.02.02.02.0006	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	618,089.00							0						0	618,089	
8.1.02.02.09.0014	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6,055,000.00							0						0	6,055,000	
8.1.02.02.12.0001	Beban Sosialisasi	6,055,000.00							0						0	6,055,000	
8.1.02.02.12.0004	Beban Pemeliharaan	107,790,000.00							0						0	107,790,000	
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62,790,000.00							0						0	62,790,000	
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor	30,690,000.00							0						0	30,690,000	
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor	27,720,000.00							0						0	27,720,000	
8.1.02.03.02.0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4,380,000.00							0						0	4,380,000	
8.1.02.03.02.0494	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45,000,000.00							0						0	45,000,000	
8.1.02.05.01.0001	Beban Perjalanan Dinas	110,835,000.00							0						0	-	
8.1.02.05.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota / Belanja Perjalanan Dinas Di	99,435,000.00							0						0	99,435,000	
8.1.02.05.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Biasa / Belanja Perjalanan Dinas Luar Da	11,400,000.00							0						0	11,400,000	
8.3.02.05.	BEBAN TAK TERDUGA	-							0						0	-10,275,177	
8.3.02.05.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin								0						0	-21,401,948	
8.3.02.05.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan								0						0	10,964,521	
8.4.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan								0						0	162,250	
8.4.01.									0						0	-	
	Kontrol	-							0						0	-	
	Total Beban -LO	1,866,103,426.00							0						0	-	
	Total Belanja Operasi	1,866,103,426.00							0						0	-	

Kontrol
Total Beban -LO 1,866,103,426
Total Belanja Operasi 1,866,103,426

Kontrol
Total Beban -LO 1,855,896,849.03
Total Belanja Operasi 1,855,896,849.03

765.300.754.96

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NOMOR	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal	765,300,754.96	817,104,377.39
2	Surplus/defisit - LO	- 1,855,896,849.03	(1,776,136,488.43)
3	R/K PPKD	1,880,133,526.00	1,734,378,866.00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	(2,500,000.00)	(10,046,000.00)
	Koreksi Akm. Penyusutan Pertama kali		
	Koreksi Hutang Tahun Lalu	-	-
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	-	-
	Mutasi Tambah Aset Tetap	-	6,632,000.00
	Mutasi Kurang Aset Tetap	-	(16,678,000.00)
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya	-	-
	Koreksi kurang aset Ekstra Kompatabel	- 2,500,000.00	
5	Ekuitas Akhir	787,037,431.93	765,300,754.96
		787,037,431.93	

-
Koto Baru Smlg, Januari 2022
CAMAT PAYAKUMBUH

JONIAN TO,S.STP
NIP: 19810531 200012 1 001

1,830,362,286.97

2020	-	R/K (M) PPKD
1,734,378,866.00	-	R/K (k) PPKD
1,734,378,866.00		
2021	-	R/K (M) PPKD
1,880,133,526.00	-	R/K (k) PPKD
1,880,133,526.00		

1,880,133,526.00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Payakumbuh

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Payakumbuh disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan

Tahun Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Payakumbuh dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2021 Kecamatan Payakumbuh berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintahan Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Tahun Anggaran, dan Neraca,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh;
 - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan
 - 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- II. Ekonomi Maksro Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
 - 2.1 Kebijakan Keuangan;
 - 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Laporan Operasional
 - 5.1.3 Neraca
- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
- VII. Penutup.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DA PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Payakumbuh diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Payakumbuh tahun anggaran 2021 meliputi hal berikut :

2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2021 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Payakumbuh adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Payakumbuh disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2021 Kecamatan Payakumbuh menetapkan 8 Program yang didukung oleh 23 Kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4. Program Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Ini terbukti dengan 7 (delapan) program yang ada di Kecamatan Payakumbuh tercatat sampai akhir tahun 2021 mencapai realisasi 95%-100%. Tahun 2021 ini terjadi Pandemi Covid 19 yang mewabah di seluruh Dunia, dengan mewabahnya Covid 19 ini maka adanya Refocusing Anggaran di Tahun 2021 yang terjadi di kabupaten lima Puluh Kota salah satunya OPD Kecamatan Payakumbuh untuk Penanganan Covid 19. Ada beberapa program dan kegiatan yang direfocusing untuk Covid 19 di Tahun 2021.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2021 Kecamatan Payakumbuh terdapat satu (1) sumber pendapatan asli daerah yang syah sebagaimana rincian table dibawah ini .

Jenis pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi 2021	
		Rp	%
<i>P endapatan Asli Daerah</i>			
<i>Retribusi Daerah</i>			
<i>Retribusi Izin mendirikan Bangunan</i>	-	-	-
<i>Jumlah</i>	-	-	-

Dalam DPA tahun 2021 Kecamatan Payakumbuh tidak dianggarkan capaian target pendapatan, karena seluruh kepengurusan IMB dipindah alihkan kepengurusannya ke DPMPTSP.

3.1.2. Belanja

Total belanja Kecamatan Payakumbuh tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.880.133.526,- Jumlah tersebut mencapai 97,33% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.931.794.246,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA OPERASI	1.914.293.249	1.866.103.426	97,48
Belanja Pegawai	1.510.337.409	1.472.035.253	97,46
Belanja Barang Jasa	403.955.840	394.068.173	97,55
Belanja Modal	17.500.000	14.030.100	100
Belanja Peralatan dan mesin	17.500.000	14.030.100	100
Jumlah	1.931.794.246	1.880.133.526	97,33

Pada Belanja operasi dari yang dianggarkan sebesar Rp. **1.914.293.249,-** realisasi sebesar Rp. **1.866.103.426,-** atau sebesar 97,48 %. Pada belanja modal untuk tahun 2021 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 17.500.000,- realisasi sebesar Rp. 14.030.100,- atau terealisasi sebesar 80,17 %

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

1. Belanja

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Payakumbuh dari total belanja telah terealisasi sebesar 97,33 % ini dan secara fisik 100%, dan tidak ada kegiatan yang realisasi dibawah 80 %.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2021, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akruwal.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2021 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Kecamatan Payakumbuh sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akruwal.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Tahun Anggaran. Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak pemerintah Daerah

dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1). Kas

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2). Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3). Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4). Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cast*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat diTahunkan (*Net Realizable value*).

5). Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya

pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6). Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian digunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7). Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 300.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

8). Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9). Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan dilakukan Penyusutan.

10). Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basisi kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompnsasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan diTahun, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.1	Pendapat. Retribusi Daerah	0,-	0,-
	Untuk pendapatan dalam tahun 2021 yang berupa retribusi izin bangunan dalam DPA kecamatan Payakumbuh dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,-		
	- Retribusi Izin Mendirikan bangunan	0,-	0,-
	Sub Jumlah	0,-	0,-

Realisasi IMB tahun 2021 dengan nilai Rp. 0,- disebabkan karena tidak dianggarkannya didalam DPA dikarenakan segala kepengurusan telah dipindahkan ke DPMPTSP.

5.1.2	Tahun 2021	Tahun 2020
9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO	1.472.035.253	1.332.619.081
- Gaji dan tunjangan	1.077.244.753	1.026.473.732
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	314.640.500	306.145.349
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.180.000	0
- Beban Persediaan	49.856.500	13.228.950
- Beban Jasa Kantor	125.586.673	205.151.335
- Beban Pemeliharaan Kendaraan	107.790.000	51.763.850
- Beban Cetak dan Penggandaan		3.390.500
- Beban Makanan dan Minuman		16.362.500
- Pakaian Dinas dan Atributnya		10.000.000
- Honorarium Non PNS		60.790.000
- Honorarium PNS		58.500.000

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1.500.000
	- Beban Perjalanan Dinas	110.835.000	82.580.000
	- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.3	Belanja Modal	14.030.100	99.299.500
5.1.3.1	Peralatan dan Mesin	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	Perkiraan BM peralatan dan mesin terdiri dari :		
	Peralatan dan Mesin	14.030.100	99.299.500
	1. Pengadaan Kursi Kerja Eselon IV	14.030.100	0
	2. Pengadaan Komputer	0	24.979.000
	3. Kipas angin	0	4.200.000
	4. Printer		20.100.000
	5. Meja Rapat		15.000.000
	6. Kursi Rapat		32.000.000
	7. Alat Studio Mix Werels		3.020.000
5.1.3.2	Gedung Bangunan	45.000.000	0
	Rincian berupa :		
	1. Rehab gedung bangunan	45.000.000	0

5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2021 dan 2021.

5.2.1 Pendapatan LO

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
8.1. Pendapatan Asli Daerah – LO	0	0
Pendapatan Pajak Daerah – LO		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		-

5.2.2 Beban Operasi

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
9.1 BEBAN OPERASI	1.653.422.191	1.688.598.676,56
Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :		
9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO	1.472.035.253	1.332.619.081
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN – LO	1.077.224.753	1.026.473.732
Gaji dan tunjangan	1.077.244.753	1.026.473.732
BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	314.630.500	306.145.349
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	314.630.500	306.145.349
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	80.180.000	0
Beban Honorarium	80.180.000	0

9.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA -LO

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Barang dan Jasa	403.955.840	394.068.173

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun anggaran 2021 dan 2020, Jumlah Tahun beban barang dan jasa tersebut dirinci sebagai berikut:

❖ **Beban Persediaan**

Jumlah ini merupakan Tahun beban persediaan dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021	Tahun 2020
Sisa Persediaan di Neraca Awal Tahun Anggaran 2021 dan 2020		
Beban Persediaan	49.856.500	13.228.950
Sisa Persediaan di Neraca Akhir Tahun Anggaran 2021 dan 2020	-	-
Beban Persediaan	49.856.500	13.228.950

Beban Persediaan untuk tahun 2021 dan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
BEBAN PERSEDIAAN	49.856.500	13.228.950
Beban Bahan-bahan Lainnya	0	0
Beban alat tulis Kecamatan-LO	17.320.900	10.292.950
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak-LO	7.605.100	0
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos-LO	280.000	436.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO	534.000	1.500.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LO	3.321.000	0
Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO	0	0
Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO	0	1.000.000
Beban Obat-Obatan-Obat-LO	0	0
Beban Makanan dan Minuman Rapat-LO	16.670.500	0
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO	4.125.000	0

**Tahun 2021
(Rp)**

**Tahun 2020
(Rp)**

❖ **Beban Jasa**

125.586.673

205.151.335

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Jasa Kantor	118.707.554	4.344.485
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer-LO	18.000.000	0
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum-LO	54.000.000	0
Beban Jasa Tenaga Kebersihan-LO	18.000.000	0
Beban Jasa Tenaga Ahli / Tim Pelaksana Kegiatan	5.040.000	0
Beban jasa listrik-LO	3.305.000	2.904.485
Beban jasa surat kabar/majalah-LO	1.260.000	1.440.000
Beban Lembur-LO	13.752.000	0
Beban jasa Pengganti Transportasi-LO	0	0
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	824.119	0
Beban Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN-LO	0	0
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN-LO	206.030	0
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN-LO	618.089	0
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Beban Sewa Peralatan Studio Audio-LO	0	0
Beban Sewa Sewa Gedung dan Bangunan	0	0
Beban Sewa Gedung dan Bangunan-	0	0

LO		
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.055.000	0
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-LO	6.055.000	0
	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Pemeliharaan	107.790.000	51.763.850
Beban Pemeliharaan peralatan dan Mesin	62.790.000	51.763.850
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	30.690.000	0
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO	27.720.000	
Beban jasa Jasa Service-LO	0	1.525.650
Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	0	6.959.500
Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	0	42.359.000
Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO	0	919.700
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer-LO	4.380.000	0
Beban Pemeliharaan Gedung Bangunan-LO	45.000.000	0
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO	0	0
	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN	0	3.390.500
Beban Belanja cetak-LO	0	735.000
Beban Belanja Penggandaan-LO	0	2.655.500
Beban Publikasi	0	0

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN	0	16.362.500
Belanja makanan dan minuman rapat-LO	0	13.832.500
Belanja makanan dan minuman Tamu-LO	0	2.530.000

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
BEBAN BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	0	10.000.000
Belanja Pakaian Dinas Harian -LO	0	10.000.000

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
HONORARIUM NON PNS	0	60.790.000
Beban Jasa Kebersihan Kecamatan-LO	0	16.320.000
Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO	0	44.020.000
Belanja Honorarium MC-LO	0	50.000
Beban jasa Pembaca Doa-LO	0	50.000
Beban Pemimpin Lagu-LO	0	50.000
Beban Honorarium Moderator-LO	0	300.000

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
HONORARIUM PNS	0	58.500.000
Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO	0	12,600,000
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK OPD) dan Pembantu PPK-LO	0	10.200.000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO	0	26.100.000
Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO	0	9.600.000

❖ **Beban Pemeliharaan**

Jumlah ini merupakan beban pemeliharaan dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
BEBAN PEMELIHARAAN	0	1.500.000
Beban pemeliharaan gedung	0	0
Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor-LO	0	1.500.000

❖ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
BEBAN PERJALANAN DINAS	110.835.000	82.580.000
Beban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / perjalanan dinas dalam daerah-LO	99.435.000	81.930.000
Beban Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO	11.400.000	650.000

❖ **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan-LO	0	0
Mutasi Kurang Reklass keluar/pindah rekening	0	0
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan-LO	0	0
Mutasi Tambah Beban Hibah	0	0

❖ **Beban Lain-Lain**

Jumlah ini merupakan beban Lain-lain dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
BEBAN lain-lain	0	36.654.000
Beban lain-lain	0	36.654.000

❖ **Beban Penyusutan**

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
BEBAN PENYUSUTAN	(10.275.176,97)	104.603.122,43

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 104.603.122,43 dan beban penyusutan tahun 2021 adalah sebesar $-(10.275.176,97)$ berasal dari total penyusutan di neraca 2021 dikurangi dengan total penyusutan di neraca akhir tahun 2021 dari masing – masing kelompok aset tetaP Karena Koreksi Akumulasi Penyusutan KIB B Tahun 2020 terlampir sebesar $-(528.751.215)$ seharusnya (546.579.178) disebabkan karena terjadi kesalahan rumus pada penetapan masa manfaat alat studio dan komunikasi berupa mix wereless pengadaan tahun 2020 dan pada alat angkutan tak bermotor belum dihitung akumulasi penyusutannya.

5.3 Neraca

No	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
1.	Kas di Bend.	0	0
	Penerimaan		

Jumlah tersebut adalah merupakan saldo kas di bendahara penerimaan berasal dari setoran Pajak Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernilai Nihil Karena seluruh penerimaan telah disetor ke Kas Daerah pada

tanggal tersebut.

2.	Kas di Bendh. Pengeluaran	Tahun 2021	Tahun 2020
		0	0

Tidak ada Kas di Bendehara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

3.	Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020
		131.400	200.000

Terdapat persediaan berupa Alat Tulis Kantor Rp. 55.000,- selama tahun 2021.

4.	Tanah	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
		145.320.000	145.320.000

5.	Peralatan dan Mesin	Tahun 2021	Tahun 2020
		580.080.315	568.550.215

Pada Tahun 2021 Adanya penambahan Alat Kantor Rumah Tangga Berupa Kursi Pejabat Eselon IV 7 bh @ 2.004.300 dengan jumlah Rp. 14.030.100.

Pada dampak komulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar Kecamatan Payakumbuh per 31 Desember 2021 pada peralatan dan mesin sebesar 2.500.000 dengan rincian : 5 buah kursi Susun tahun 2018 sebanyak 5 buah @500.000 dengan total 2.500.000 yang disebut Extracom karena harga dibawah 750.000 rupiah untuk itu termasuk extracom.

6.	Gedung & Bangunan	Tahun 2021	Tahun 2020
		866.494.800	866.494.800

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Payakumbuh pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020, yang mana pada Tahun 2021 ada Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp. 0 .

	SALDO AWAL (AUDITED 31 Des 2020)	0
	MUTASI TAMBAH	0
	MUTASI KURANG	0
	SALDO PER 31 Des 2021	1.880.133.526

7.	Penyusutan Aset	Tahun 2021	Tahun 2020
		(811.479.083,07)	(821.754.260,04)

Tetap

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

	2021	2020
1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(507.349.267)	(528.751.215)

Karena Koreksi Akumulasi Penyusutan KIB B Tahun 2020 terlampir sebesar – (528.751.215) seharusnya (546.579.178) disebabkan karena terjadi kesalahan rumus pada penetapan masa manfaat alat studio dan komunikasi berupa mix wereless pengadaan tahun 2020 dan pada alat angkutan tak bermotor belum terhitung akumulasi penyusutannya

2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	(302.507.316,07)	(291.542.795,04)
---	------------------	------------------

8. Aset Penyusutan Jalan ,Irigasi dan JJ	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	1.622.500	1.460.250

Jumlah tersebut merupakan nilai Penyusutan Aset Jalan Irigasi (JJ) pada posisi 31 Des 2021 dan 2020.

9. Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2021 (Rp)	Tahu 2020 (Rp)
	(0)	(0)

10. Ekuitas	Tahun 2021 (Rp)	Tahu 2020 (Rp)
	787.037.431,93	765.300.754,96

jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban oleh Kecamatan Payakumbuh pada posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp. 765.300.754,96,- dan 31 Desember 2021 sebesar Rp 787.037.431,93,-

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal **Tahun 2021** **765.300.754,96**

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Payakumbuh per 1 Januari 2021 yang terdiri dari :

1	Jumlah aset lancar	200.000,-
2	Jumlah aset tetap	765.100.754,96
3	Jumlah aset lainnya	0
4	Jumlah kewajiban	-
	Jumlah ekuitas	765.300.754,96

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban –Lo per 31 Desember 2021 serta per 31 Desember 2020

1	Surplus/defisit	Tahun 2021	Tahun 2020
		(1.855.896.849,03)	(1.776.136.488,43)

3. PPKD

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurangi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 1.880.133.526,- dan 31 Desember 2020 1.734.378.866,-.

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan

Mendasar

Pada Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar Kecamatan Payakumbuh per 31 Desember 2021 (2.500.000) yang terdiri dari Koreksi Kurang Aset Ekstra Kompatable. Dan Pada Tahun 2020 sebesar (10.046.000) yang terdiri dari Mutasi Tambah Aset Tepat sebesar Rp. 6.632.000 dan Mutasi Kurang Aset tetap (16.678.000).

5. Ekuitas Akhir

787.037.431,93

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Payakumbuh per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 787.037.431,93 yang terdiri dari:

1. Jumlah Aset Lancar	131.400
2. Jumlah Aset Tetap	786.906.031,93
3. Jumlah Aset Lainnya	0
4. Jumlah Kewajiban	0
Jumlah Ekuitas	787.037.431,93

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Kecamatan. Kecamatan Payakumbuh adalah wilayah kerja Camat Payakumbuh selaku perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi PPM
- e. Seksi Trantib
- f. Seksi Sosial
- g. Seksi Pelayanan
- h. Subag Umum dan Kepegawaian
- i. Subag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- j. Kelompok UPT

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan. Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Payakumbuh diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Tahun Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total belanja Kecamatan Payakumbuh dalam tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp 1.880.133.526,- atau 97,33 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.931.793.249,- dengan rincian sebagai berikut :

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI	1.914.293.249	1.866.103.426	97,48
Belanja Pegawai	1.510.337.409	1.472.035.253	97,46
Belanja Barang Jasa	403.955.840	394.068.173	97,55
Belanja Modal	17.500.000	14.030.100	80,17
Belanja Peralatan dan mesin	17.500.000	14.030.100	80,17
Jumlah	1.931.793.249	1.880.133.526	97,33

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN KEUANGAN

KECAMATAN PAYAKUMBUH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2021

Koto Baru Simalanggang, Januari 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan tahun 2021 Kecamatan Payakumbuh

Laporan Keuangan Kecamatan Payakumbuh ini merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Kecamatan Payakumbuh Tahun 2021.

Laporan Keuangan Kecamatan Payakumbuh Tahun 2021 memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, LPE dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Kecamatan Payakumbuh Tahun 2021 masih belum sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Koto Baru Smlg, Januari 2022
CAMAT PAYAKUMBUH

JONIAN TO, S. STP.
NIP. 19810531 200012 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Payakumbuh yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) LPE dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Koto Baru Smlg, Januari 2021
CAMAT PAYAKUMBUH

JONIAN TO,S.STP.
NIP. 19810531 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi	iii
LRA Konversi	v
NERACA	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	5
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Kebijakan Keuangan	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	9
4.1 Entitas Akuntansi	9
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	9
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	13

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	16
	5.1 Laporan Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja	16
	5.2 Laporan Operasional	18
	5.3 Neraca	24
	5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	27
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	29
BAB VII	PENUTUP	
	LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	
	LAMPIRAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
	DAFTAR LAMPIRAN	
	1. LRA	
	2. Berita Acara	
	3. Fungsional per 31 Desember	
	4. Setoran UHYD	